

ANALISIS AKUNTANSI KAS IMPEREST TERPUSAT PADA PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN XII

Amril Arifin*)

Abstract : *The purpose of this study to determine the application of imprest cash accounting system centered on PT PLN (Persero) Parent Unit Development XII, and to determine whether the cash imprest centralized accounting system implemented by PT PLN (Persero) Parent Unit XII can support the development of internal control of cash. The analytical method used in this research was to study the results of observations and data obtained from PT PLN (Persero) Parent Development Unit XII in order to understanding the conditions and problems arising from the old system. Then the evaluation of the internal control of cash. Imprest cash centralized accounting system implemented by PT PLN (Persero) Parent Unit XII Development has been fully supportive of management in conducting internal control of cash.*

Keywords: *accounting systems, cash imprest centralized, internal control of cash*

PENDAHULUAN

Suatu perusahaan yang efektif dan efisien dalam lingkungan yang kompetitif adalah yang mengelola sumber daya yang dimilikinya sebaik mungkin. Menurut Nawawi (2005) mengklasifikasikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan menjadi empat tipe, yaitu sumber daya finansial, sumber daya fisik, sumber daya manusia dan sumber daya kemampuan teknologi. Sumber daya finansial atau keuangan adalah sumber daya yang menempati posisi strategis setelah sumber daya manusia. Dengan penanganan yang baik terhadap sumber daya financial yakni berupa kas perusahaan maka akan dapat mempertahankan bahkan mengembangkan kelangsungan hidup perusahaan.

Bagi perusahaan, kas merupakan elemen penting dalam keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan. Setiap perusahaan selalu berusaha menciptakan system yang baik untuk keberadaan kasnya. Bila kasnya sangat terbatas maka operasional perusahaan akan terganggu, demikian juga bila kas yang berlebih akan mengakibatkan timbulnya *idle cash*, yang merupakan aktiva yang tidak produktif. Kas memiliki sifat yang

sangat likuid dan mudah sekali untuk dilakukan penggelapan (*fraud*) sehingga manajemen harus terus memberikan perhatian lebih terhadap pengendalian intern kas. Pengendalian intern merupakan suatu cara mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi.

Pengendalian intern terhadap kas memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengeluaran kas hanya dilakukan apabila persyaratan dan bukti pendukung transaksi telah lengkap dan selanjutnya dilakukan otorisasi. Perusahaan dalam menciptakan pengendalian intern tidak terlepas dari syistem akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Salah satu wujud pengendalian intern yang dapat dilakukan oleh perusahaan terhadap kas adalah pengeluaran kas dengan sistem pembentukan dana kas kecil. Selain itu, bahwa tidak diperkenankannya satu individu yang diperbolehkan memegang satu tanggungjawab dan kekuasaan sepenuhnya dalam melaksanakan semua fase kegiatan dari awal hingga selesai. Sehingga diperlukan adanya pemisahan tugas dan wewenang yang jelas untuk masing-masing kegiatan yaitu antara tanggungjawab pelaksanaan pembukuan

dan pembuatan laporan mengenai hasil-hasilnya.

PT PLN (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kelistrikan, yang menganut system sentralisasi atau imprest terpusat. Sistem imprest terpusat ini mengandung arti bahwa pengaturan penerimaan keuangan dan penggunaan keuangan dilakukan secara terpusat. Objek penelitian adalah PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XII yang menggunakan kas untuk membiayai kegiatan operasional rutin maupun kegiatan yang bersifat non rutin atau investasi yakni proyek pembangunan pembangkit listrik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah sistem akuntansi kas imprest terpusat dapat mendukung dalam pengendalian intern kas pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XII?.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi kas imprest terpusat pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XII.
2. Untuk mengetahui apakah sistem akuntansi kas imprest terpusat yang diterapkan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XII dapat mendukung pengendalian intern kas.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Unsur-Unsur Sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi (2005), sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sedangkan

menurut Baridwan (2008), sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menilai hasil operasi.

Adapun unsur-unsur dari sistem akuntansi adalah:

a. Formulir/dokumen

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi, serta merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan.

b. Catatan-catatan

Ada tiga catatan yang digunakan yaitu jurnal, buku besar, dan buku besar pembantu..

c. Laporan

Unsur sistem akuntansi yang terakhir adalah laporan. Setelah transaksi dicatat dan diikhtisarkan, maka disiapkan laporan bagi pemakai. Laporan yang menghasilkan informasi tersebut dikenal sebagai laporan keuangan.

Pengertian dan Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2005:163), Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Tunggal (1995:1), pengendalian intern meliputi organisasi dan semua metode serta ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi dalam suatu perusahaan untuk mengamankan

kekayaan, memelihara kecermatan dan sampai seberapa jauh dapat dipercayanya data akuntansi.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern

Unsur-unsur pengendalian intern menurut Warren, Reeve, & Duchac (2000: 390) terdiri dari :

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penilaian Resiko
- c. Prosedur Pengendalian
- d. Pemantauan atau Monitoring
- e. Informasi dan Komunikasi

Menurut Mulyadi (2005:386), unsur pokok pengendalian intern adalah sebagai berikut :

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.
- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Sistem Akuntansi Penenerimaan Kas

Menurut Mulyadi (2005:482), sumber penerimaan kas suatu perusahaan manufaktur biasanya berasal dari pelunasan piutang dari debitur, karena sebagian besar produk perusahaan tersebut dijual melalui penjualan kredit.

Dokumen yang digunakan

Menurut Mulyadi (2005:488), dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang menurut adalah sebagai berikut :

- a. Surat Pemberitahuan.
- b. Daftar Surat Pemberitahuan.
- c. Bukti Setor Bank
- d. Kuitansi.

Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas

Menurut Mulyadi (2005:490), unsur pengendalian intern dalam sistem penerimaan kas dari piutang adalah :

- a. Organisasi.
 - 1) Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas.
 - 2) Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.
- b. Sistem Otoritas dan Prosedur Pencatatan.
 - 1) Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah bukuan.
 - 2) Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi.
 - 3) Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi (bagian piutang) harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur.
- c. Praktik Yang Sehat.
 - 1) Hasil perhitungan kas harus direkam dalam berita acara perhitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera.
 - 2) Para Penagih dan Kasir harus diasumsikan.
 - 3) Kas dalam perjalanan harus diasuransikan.

Sistem Akuntansi pengeluaran kas

Secara garis besar pengeluaran kas perusahaan dilakukan melalui dua sistem, yaitu sistem pengeluaran kas dengan cek dan sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui dana kas kecil. Pengeluaran kas yang dilakukan dengan tunai biasanya jumlahnya relatif kecil. (Mulyadi, 2005:509)

Fungsi Pemeriksaan Intern

Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas (*cash*

count) secara periodic dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi (rekening kas dalam buku besar). Adapun fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem pengeluaran kas tunai dengan dana kas kecil (Mulyadi, 2005:534) adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi Kas.
- b. Fungsi Akuntansi.
- c. Fungsi Pemegang Dana Kas Kecil.

Dokumen yang Digunakan

Menurut Mulyadi (2005:510), dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah :

- a. Bukti kas keluar
- b. Cek
- c. Permintaan cek (*check request*)

Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas

Menurut Mulyadi (2005:517), unsure pengendalian intern dalam sistem pengeluaran kas dengan cek adalah :

- a. Organisasi
- b. Sistem Otoritas dan Prosedur Pencatatan
- c. Praktik yang Sehat

Hipotesis

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diduga bahwa : “sistem akuntansi kas imprest terpusat yang diterapkan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XII telah sepenuhnya mendukung manajemen dalam melakukan pengendalian intern kas.”

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai peranan sistem akuntansi kas imprest terpusat dalam mendukung pengendalian intern kas dilakukan pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XII yang berlokasi di jalan Letjen. Hertasning, Makassar. Adapun waktu penelitian

selama 3 (tiga) bulan yaitu dimulai dari bulan Desember 2013 sampai dengan Februari 2014.

Metode Analisis

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Mempelajari hasil observasi dan data yang diperoleh dari PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XII dalam rangka pemahaman kondisi serta permasalahan yang timbul dari sistem yang lama. Kemudian akan dilakukan evaluasi terhadap pengendalian intern kas.
2. Memahami tentang sistem akuntansi kas imprest terpusat dalam mendukung pengendalian intern kas.
3. Mengelolah data yang telah di kumpulkan sebagai bahan untuk menganalisa permasalahan yang ada dengan output pengambilan keputusan manajemen dalam laporan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam sisi pemenuhan kewajiban perpajakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Keuangan Perusahaan

Dalam mengelola keuangannya, PT PLN (Persero) menganut pola sentralisasi. Pola sentralisasi ini mengandung arti bahwa pengaturan penerimaan keuangan dan penggunaan keuangan dilakukan secara terpusat. Pelaksanaan pembiayaan/imprest untuk keperluan operasional dan investasi dilakukan di masing-masing unit dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dan disetujui oleh kantor pusat.

Di PT PLN (Persero) mengenal 2 (dua) penampung untuk keuangannya yang terdiri dari :

- a) Receipt, merupakan pengelolaan keuangan dalam rangka penerimaan PLN.

- b) Imprest, merupakan pengelolaan keuangan yang dilakukan dalam rangka membiayai keperluan operasional, seperti untuk membayar biaya pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan (material dan jasa/borongan), pembelian bahan bakar dan minyak pelumas, pembelian tenaga listrik dan kegiatan operasional lainnya maupun investasi.

Maksud dan Tujuan Pengelolaan Keuangan Imprest Terpusat

Berdasarkan SK Direksi PT PLN (Persero) No. 1501.K/DIR/2011 tanggal 29 Desember 2011, maksud pengelolaan keuangan imprest terpusat adalah dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana imprest secara terpusat, dimana alokasi dana imprest akan dilakukan secara mingguan sesuai rencana arus kas (*cash budget*) yang diusulkan oleh Unit Pelaksana Induk (termasuk Unit pelaksana dibawahnya). SK Direksi PT PLN (Persero) No. 1501.K/DIR/2011 tanggal 29 Desember 2011 juga menyebutkan tujuan dari pengelolaan keuangan imprest terpusat, yaitu :

- 1) Menciptakan tertib administrasi keuangan, agar pengeluaran dana imprest sesuai dengan jumlah AKB serta AKO dan AKI yang telah ditetapkan, sehingga dana imprest yang tersedia dapat dioptimalkan secara terpusat.
- 2) Memberikan kepastian ketersediaan dana kepada UPI dan UP sesuai limit yang telah ditetapkan.
- 3) Memberikan keleluasaan bagi manajemen di kantor pusat untuk mengambil keputusan dan mengoptimalkan pemanfaatan dana imprest bagi kegiatan operasional perseroan.

Mekanisme Dana Imprest Terpusat

Mekanisme dana imprest terpusat yang mempengaruhi anggaran kas, meliputi :

- 1) Proses Permintaan Dana Imprest

- a) UPI menyusun rencana AKB (Anggaran Kas Bulanan) pembiayaan operasi dan investasi dengan mempertimbangkan aspek operasi dan investasi serta alokasi unit dibawahnya, untuk satu bulan kedepan serta pengalihan dana kepada unit penerima jasa;
- b) Rencana AKB pembiayaan operasi dan investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, diusulkan melalui aplikasi dan megirimkan surat kepada KDIVBDH (Kepala Devisi Perbendaharaan) sebagai acuan dana untuk mempersiapkan dan secara terpusat;
- c) Bagan Alir Proses Pengajuan Permintaan Kebutuhan Pembiayaan per periode sesuai surat keputusan Direksi Nomor 1501.K/DIR/2011.
- d) Penggantian Biaya antar Unit
 1. Unit penanggung memasukkan ke dalam aplikasi jumlah yang akan dialihkan kepada unit pembayar sesuai dengan jumlah dan periode yang disepakati kedua belah pihak paling lambat tanggal 25 bulan sebelumnya.
 2. Unit pembayar menyetujui penggantian biaya tersebut pada aplikasi dan KDIVBDH c.q. MSPB me;akukan persetujuan pengalihan dana pada aplikasi.
 3. Bagan Alir Proses Pengajuan Penggantian Biaya Antar Unit sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 1501.K/DIR/2011.
- e) Alokasi pada PLN Jasa Penunjang terkait penugasan yang mempengaruhi AKO dan AKI diatur sebagai berikut :
 1. Membuat kesepakatan kedua belah pihak (MOU);
 2. Sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan atau dokumen pendukung lainnya PLN Jasa Penunjang

- mengajukan tagihan dan jadwal pembayaran ke PLN Unit Pemberi Kerja dengan tembusan KDIVBDH;
3. PLN Unit Pemberi Kerja mengirimkan surat kepada KDIVBDH dengan tembusan DIRKEU, KDIV teknis terkait dan KDIVANG (Kepala Devisa Anggaran) perihal pengalihan limit PLN Unit Pemberi Kerja kepada PLN Unit Jasa Penunjang pada periode tertentu;
 4. Pengalihan tersebut sebagai tambahan limit PLN Jasa Penunjang, sepanjang tidak “melampaui” penetapan AKO dan AKI pada PLN unit Pemberi Kerja;
 5. Bagan Alir Proses Pengalokasian Anggaran Kas ke PLN Jasa Penunjang sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 1501.K/DIR/2011.
- 2) Persetujuan Dana Imprest
 - a) KDIVBDH c.q. MSPB menetapkan batasan penggunaan dana periode I sampai dengan IV untuk UPI dan UP sesuai kebutuhan yang diusulkan oleh UPI;
 - b) Untuk kebutuhan dana valas, kantor pusat memberi dana valas ke Unit dengan cara transfer ke rekening valas Unit;
 - 3) Penggunaan Dana Imprest
 - a) Penggunaan dana oleh UPI maupun UP untuk pembayaran kontrak/SPK/Perjanjian dan lain-lain kepada penyedia barang dan jasa dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening penyedia barang dan jasa sesuai dengan isi perjanjian serta permohonan penyedia barang dan jasa;
 - b) Penggunaan cek hanya untuk pengambilan tunai dalam rangka pengisian kas;
 - c) Tagihan untuk UPI yang dibayarkan oleh kantor pusat akan mengurangi AKO dan AKI UPI pada bulan bersangkutan;
 - d) Penggunaan dana valas oleh UPI harus sesuai dengan kebutuhan yang telah diminta ke kantor pusat dan sisa dana valas yang tidak digunakan oleh UPI, dikembalikan ke rekening valas kantor pusat paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - 4) Pelaporan Dana Imprest
 - a) Masing-masing UPI dan UP berpedoman secara konsisten pada AKB yang dirinci per periode yang telah disampaikan ke KDIVBDH;
 - b) Laporan realisasi (operasi dan investasi) sesuai dengan format aplikasi imprest terpusat yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dikirim setiap bulan kepada KDIVBDH dan KDIVANG paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - c) Laporan dan nota pembukuan atas dana UP dan UPI yang *di-sweeping* didalam rekening imprest terpusat dilakukan setiap bulan oleh UPI bersamaan dengan laporan realisasi dana imprest terpusat yang disampaikan kepada KDIVBDH dan KDIVAKT (Kepala Devisi Akuntansi) paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - d) Perlakuan nota buku antar UPI/UP berjalan sesuai transaksi yang terjadi pada bulan yang bersangkutan;

- e) Nota pembukuan realisasi penggunaan dana imprest dilakukan pada setiap hari Senin kecuali akhir periode (bulan, triwulan atau tahunan) yang dilakukan sehari setelah penutupan pembukuan. Nota pembukuan atas realisasi penggunaan dana imprest pada rekening imprest terpusat untuk UP dan UPI dikirim oleh KDIVAKT c.q. MSAS (manajer Senior Akuntansi Segmen) ke UPI;
- f) Realisasi pembayaran di kantor pusat yang merupakan anggaran UPI akan diinformasikan oleh MSPB kepada UPI terkait paling lambat 5 hari kerja setelah transaksi, selanjutnya KADIVAKT c.q. MSAS akan mengirim nota pembukuan ke UPI.

Sistem Pengendalian Intern Kas

Dalam hasil penelitian yang dilakukan penulis dan setelah dibandingkan dengan landasan teori yang terdapat di bab sebelumnya maka unsur pengendalian intern pada PT PLN (persero) Unit Induk Pembangunan XII telah cukup memadai.

Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan

Dari segi pemisahan tugas, maka setiap kegiatan dalam persiapan, perhitungan serta pendistribusian gaji dan upah harus mendapat persetujuan dari yang berwenang, yang berguna untuk menghindari adanya transaksi yang menyimpang dari semestinya. Misalnya dalam pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh bagian keuangan dan mendapat persetujuan dari bagian akuntansi kemudian dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan. Setiap potongan atas gaji dan upah pegawai selain dari pajak penghasilan pegawai

didasarkan atas surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh bagian sumber daya manusia. Setiap pegawai yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat pengangkatan pegawai yang ditandatangani oleh Direktur Utama. Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Daftar hadir diotorisasi oleh bagian sumber daya manusia sebagai fungsi pencatat waktu. Daftar gaji dan upah diotorisasi oleh sumber daya manusia. Perubahan yang terjadi dalam catatan penghasilan pegawai direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah pegawai.

Praktik-praktik yang Sehat

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XII telah melaksanakan praktik-praktik yang sehat dalam pengendalian intern terhadap sistem akuntansi kas imprest diantaranya dengan melakukan pengendalian yang dilakukan sebelum penerimaan/pengeluaran kas imprest. Adapun pengendalian yang dilakukan sebelum penerimaan/pengeluaran kas meliputi :

- 1) Kartu Pengendalian *cash budget* (Anggaran Kas)
- 2) Kartu Pengendalian Utang Usaha
- 3) Kartu Pengendalian Piutang Pegawai
- 4) Kartu Pengendalian Pungutan Pajak yang Harus Disetor
- 5) Kartu Pengendalian Dropping dari PT PLN (Persero) Kantor Pusat

Pengendalian yang dilakukan setelah penerimaan/pengeluaran kas dilakukan meliputi :

- 1) Rekonsiliasi Kas Imprest
- 2) Rekonsiliasi Bank Imprest
- 3) Rekonsiliasi Piutang Pegawai.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Kebijakan keuangan perusahaan PT PLN (Persero) menganut

pola sentralisasi, yang mengandung arti bahwa pengaturan penerimaan dan penggunaan keuangan dilakukan secara terpusat. Pelaksanaan pembiayaan/ imprest untuk keperluan operasional dan investasi dilakukan di masing-masing unit dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Kantor Pusat. Pola sentralisasi keuangan ini selanjutnya dikenal dengan Imprest Terpusat. PT PLN (Persero) telah melaksanakan Mekanisme Dana Imprest Terpusat PT PLN (Persero) sesuai Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1501.K/DIR/2011. Kebijakan-kebijakan dan prosedur keuangan Imprest Terpusat yang telah ditetapkan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XII telah sepenuhnya mendukung pengendalian intern kas.

Sistem wewenang prosedur penerimaan dan pengeluaran kas imprest sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap transaksi yang berhubungan dengan permintaan dan pengeluaran kas imprest harus mendapat verifikasi, otorisasi dan persetujuan dari bagian yang berwenang.

Adanya dokumen-dokumen serta catatan-catatan akuntansi yang memadai dalam mendukung Sistem Akuntansi Kas Imprest Terpusat. Keseluruhan dokumen tersebut telah terprogram dalam software komputer.

SARAN

Memaksimalkan dan mempertahankan system pengendalian intern yakni praktik-praktik yang sehat terkait pengendalian intern kas yang selama ini dilakukan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XII.

Menerapkan pengelolaan kas kecil untuk pengeluaran kas yang jumlahnya relatif kecil sebagai pilihan selain dengan pengelolaan kas imprest yang saat ini telah ditetapkan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XII.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan,Zaki. 2008. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- Boynton C,William, Reymond N, Johnson and Walter G.Kell. 2003.*Modern Accounting*. Edisi Ketujuh.Jilid satu.Alih Bahasa oleh Paul A.Radjoe. Gina Gania. Ichsan Setyo Budi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nawawi,Hadari.2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia.Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Cetakan Ke-4 Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hall,James A.2001.*Sistem Informasi Akuntansi*. Terjemahan Salemba Empat. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia.2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Revisi Juli 2009. Jakarta; Salemba Empat.
- Mulyadi.2005. *Auditing*. Buku Dua. Edisi Keenam. Cetakan Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
-2005.*Sistem Akuntansi*.Edisi Ketiga. Jakarta; Salemba Empat.
-,Johny Setyawan. 2001. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen; Sistem Pelipatgandaan Kinerja Perusahaan*. Edisi

Kedua. Cetakan Pertama.
Jakarta: Salemba Empat.

Tunggal, Amin Widjaja. 1995. Struktur
Pengendalian Intern. Cetakan
Pertama. Jakarta. PT Rineka
Cipta.

Warten, Reeve and Duchae. 2009.
Pengantar Akuntansi. Edisi
Dua Puluh Satu. Jakarta:
Salemba Empat.

****) Penulis adalah Dosen pada STIE
YPUP Makassar***